



## **Badan Pembinaan Hukum Nasional**

**Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 (SATKER)**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017

**Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan  
Jakarta Timur 13640**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2018  
Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran,

Audy Murfi MZ, SH., MH  
NIP. 19630327 198903 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
VI. Lampiran dan Daftar	55



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. May. Jend. Sutoyo-Cililitan No.10 Jakarta Timur

Telp. 021-8091908 Fax 021-8002265 website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2018

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

NIP. 19620627 198803 2 001

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp123.796.164 atau mencapai 1.375,51 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp9.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp32.974.050.647 atau mencapai 96,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp34.217.880.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp127.989.125.279 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp165.471.241; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp124.496.171.788; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.327.482.250. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp124.405.509 dan Rp127.864.719.770.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp16.437.996, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp35.839.915.446 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp35.823.477.450). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp120.436.996 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp35.703.040.454).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp98.262.990.323 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp35.703.040.454) dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp32.454.515.418 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp32.850.254.483 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp127.864.719.770.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017		% thd Angg	31 DESEMBER 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	9,000,000	123,796,164	1375.51	109,863,675
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>9,000,000</b>	<b>123,796,164</b>	<b>1375.51</b>	<b>109,863,675</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	14,718,363,000	14,669,922,162	99.67	15,747,336,969
Belanja Barang	B.4	17,844,461,000	16,695,127,562	93.56	19,218,549,299
Belanja Modal	B.5	1,655,056,000	1,609,000,923	97.22	1,211,750,659
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>34,217,880,000</b>	<b>32,974,050,647</b>	<b>96.36</b>	<b>36,177,636,927</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

## NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	165.471.241	173.536.165
Jumlah Aset Lancar		165.471.241	173.536.165
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	74.534.060.000	62.977.940.407
Peralatan dan Mesin	C.15	17.075.273.919	16.516.817.758
Gedung dan Bangunan	C.16	45.914.571.000	34.609.501.161
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	1.487.648.950	1.482.784.659
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(14.515.382.081)	(20.654.921.785)
Jumlah Aset Tetap		124.496.171.788	94.932.122.200
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	3.352.553.000	3.199.683.000
Aset Lain-Lain	C.22	1.528.234.500	1.086.414.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.553.305.250)	(1.112.078.375)
Jumlah Aset Lainnya		3.327.482.250	3.174.018.625
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>127.989.125.279</b>	<b>98.279.676.990</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	117.730.842	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	6.674.667	16.686.667
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		124.405.509	16.686.667
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>124.405.509</b>	<b>16.686.667</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	127.864.719.770	98.262.990.323
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>127.864.719.770</b>	<b>98.262.990.323</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>127.989.125.279</b>	<b>98.279.676.990</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



### III. LAPORAN OPERASIONAL

## BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	16.437.996	10.960.573
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>16.437.996</b>	<b>10.960.573</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	14.712.195.162	15.747.336.969
Beban Persediaan	D.3	364.486.669	520.928.857
Beban Barang dan Jasa	D.4	10.085.710.930	9.670.806.891
Beban Pemeliharaan	D.5	1.993.779.269	2.091.686.316
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.337.740.288	6.734.414.525
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.346.003.128	3.727.167.481
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(24.769)
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>35.839.915.446</b>	<b>38.492.316.270</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(35.823.477.450)</b>	<b>(38.481.355.697)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		77.802.668	44.750.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		90.097.228	71.677.650
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		47.462.900	2.598.016
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>120.436.996</b>	<b>113.829.634</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(35.703.040.454)</b>	<b>(38.367.526.063)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(35.703.040.454)</b>	<b>(38.367.526.063)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### BADAN PEMBINAAN HUKUMNASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	98.262.990.323	98.006.546.766
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(35.703.040.454)	<b>(38.367.526.063)</b>
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	32.488.647.989	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(34.132.571)	1.655.869.578
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	(4.378.000)
JUMLAH		<b>32.454.515.418</b>	1.651.491.578
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	32.850.254.483	36.972.478.042
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>127.864.719.770</b>	<b>98.262.990.323</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Hukum

##### Nasional

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

#### **RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kementerian Hukum dan HAM memiliki fungsi strategis dalam tahapan legislasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki kewenangan yang cukup besar dalam dua lingkup yakni tahap pra legislasi dan pasca legislasi.

Pembinaan Hukum Nasional memiliki fungsi pembentukan hukum sekaligus juga fungsi pelayanan hukum. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan melalui serangkaian tugas yang saling berkaitan. Fungsi pembentukan hukum dilakukan melalui perencanaan hukum serta analisa dan evaluasi hukum, sedangkan fungsi pelayanan hukum dilakukan melalui dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum dan bantuan hukum.

##### 1. Perencanaan Hukum

Perencanaan hukum merupakan kegiatan pembenahan/pembaruan hukum agar arah pembangunan selaras dengan arah pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pelaksanaan perencanaan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif berupa peraturan perundang-undangan namun juga sistem hukum dalam arti luas yang mencakup pembenahan pada aspek substansi hukum, kelembagaan hukum, budaya hukum dan pelayanan hukum.

Perencanaan hukum dilakukan melalui kegiatan:

##### a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan mengenai konsep dan strategi pembangunan hukum nasional memperhatikan/mengakomodasi perkembangan hukum

nasional, perkembangan hukum internasional dan perkembangan kebutuhan hukum di daerah.

- b. Penyusunan Program Legislasi Nasional usulan Pemerintah, Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari perencanaan hukum pada aspek substansi hukum. Kegiatan ini adalah pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemenkumham memiliki kedudukan sebagai coordinator penyusunan perencanaan pembentukan UU (Prolegnas) usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Program Pembentukan Peraturan Presiden.

- c. Monitoring dan Evaluasi penyusunan Program Legislasi Nasional usul Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

- d. Fasilitas Program Pembentukan Peraturan daerah (Perencanaan Pembangunan Hukum di Daerah)

Dalam rangka pembinaan sistem hukum di daerah, Kemenkumham melakukan fasilitas berupa penyediaan pedoman penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah serta asistensi dan evaluasi dalam rangka konsultasi permasalahan hukum dan perencanaan pembentukan hukum di daerah yang selaras dengan pembangunan hukum di Pusat.

- e. Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.

Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik merupakan bagian dari perencanaan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas. Tugas ini adalah pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpes No.87 Tahun 2014. Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan oleh BPHN terutama Naskah Akademik yang berasal dari RUU Prakarsa Kementerian

Hukum dan HAM sedangkan tugas penyelarasan Naskah Akademik dilakukan oleh BPHN untuk seluruh Naskah Akademik yang di susun oleh kementerian/LPNK yang RUU-nya akan dimasukkan kedalam prolegnas prioritas.

## 2. Analisa dan Evaluasi Hukum:

Bentuk kegiatan analisa dan evaluasi hukum mencakup dua kegiatan yaitu kegiatan 1) analisa dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan kolonial dan 2) analisa dan evaluasi hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku (peraturan perundang-undangan yang dibuat sejak Indonesia merdeka sampai sekarang).

Kegiatan analisa dan peraturan kolonial ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui berapa jumlah peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang masih berlaku dan berapa peraturan perundang-undangan kolonial yang sudah di ganti dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum nasional. Kegiatan ini untuk menentukan kasus status dari peraturan perundang-undangan kolonial yang belum dicabut hingga kini untuk disesuaikan dengan cita hukum nasional .

Analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, berdasarkan data inventarisasi Undang-Undang tahun 1945–2012, terdapat 1245 UU yang secara *de jure* masih berlaku tetapi secara *de facto* daya laku UU tersebut banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Maka diperlukan pembenahan peraturan perundang-undangan melalui analisa dan evaluasi secara berkala, untuk menilai daya guna dan daya laku peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan melalui kegiatan:

- Penyediaan pelayanan perpustakaan
- Pelayanan otomatis dan dokumentasi hukum

A. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

**“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”**

B. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diwujudkan melalui 4 misi yaitu :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional;
2. Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Mewujudkan penegakkan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi sosial;
4. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:



### *Pendapatan-LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Pendapatan-LO*

#### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### *Aset Lancar*

##### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan

investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, *Badan Pembinaan Hukum Nasional* telah melakukan beberapa kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya optimalisasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	31 DESEMBER 2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Pengelolaan BMN	9.000.000	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	12.754.182.000	14.843.363.000
Belanja Barang	20.790.169.000	18.374.025.000
Belanja Modal	1.328.093.000	1.655.056.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>34.872.444.000</b>	<b>34.872.444.000</b>



Realisasi  
Pendapatan  
Rp123.796.164

## B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp123.796.164 atau mencapai 1.375,51 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.000.000. Pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Iuran dan Denda dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	31 DESEMBER 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengelolaan BMN	9.000.000	83.296.031	925,51
Pendapatan Denda	-	932.633	-
Pendapatan Lain-lain	-	39.567.500	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.000.000</b>	<b>123.796.164</b>	<b>1.375,5129</b>

Realisasi Pendapatan periode 31 Desember TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 12,68 persen dibandingkan periode 31 Desember TA 2016. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan lelang berupa 2 paket kendaraan sebesar Rp77.802.668, pendapatan sewa rumah dinas sebesar Rp.5.493.363, pendapatan denda berupa paket pengadaan jasa internet Internasional dan domestik sebesar Rp932.633 serta meningkatnya pendapatan lain-lain berupa pendapatan pengembalian belanja barang yang berasal dari tahun anggaran yang lalu berupa honor sebesar Rp39.567.500.

### *Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 31 DESEMBER 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	83.296.031	70.879.166	17,52
Pendapatan Iuran dan Denda	932.633	1.518.074	-38,56
Pendapatan Lain-lain	39.567.500	37.466.435	5,61
<b>Jumlah</b>	<b>123.796.164</b>	<b>109.863.675</b>	<b>12,68</b>

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp32.974.050.647

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp32.974.050.647 atau 96,36% dari anggaran belanja sebesar Rp34.217.880.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2017*

Uraian	30 Desember 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	14,718,363,000	14,699,380,084	99.87
Belanja Barang	17,844,461,000	16,698,952,562	93.58
Belanja Modal	1,655,056,000	1,609,000,923	97.22
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>34,217,880,000</b>	<b>33,007,333,569</b>	<b>96.46</b>
Pengembalian		(33,282,922)	-
<b>Jumlah</b>	<b>34,217,880,000</b>	<b>32,974,050,647</b>	<b>96.36</b>

Perbandingan realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 8,86% dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya.

### *Perbandingan Realisasi Belanja*

#### *Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	14,669,922,162	15,747,336,969	(6.84)
Belanja Barang	16,695,127,562	19,218,549,299	(13.13)
Belanja Modal	1,609,000,923	1,211,750,659	32.78
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>32,974,050,647</b>	<b>36,177,636,927</b>	<b>(8.86)</b>

*Belanja Pegawai*  
*Rp14.669.922.162*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp14.669.922.162 dan Rp15.747.336.969. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 6,84 persen dari periode 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan antara lain karena berkurangnya jumlah pegawai (peneliti) yang telah mutasi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (BalitbangkumHAM) sesuai dengan tugas fungsinya dan beberapa pegawai yang telah memasuki masa purna bakti.

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 31 DESEMBER 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	14.354.883.084	15.345.032.981	(6,45)
Belanja Lembur	344.497.000	425.327.000	(19,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>14.699.380.084</b>	<b>15.770.359.981</b>	<b>(6,79)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(29.457.922)	(23.023.012)	27,95
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>14.669.922.162</b>	<b>15.747.336.969</b>	<b>(6,84)</b>

*Belanja Barang*  
*Rp16.695.127.562*

### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp16.695.127.562 dan Rp19.218.549.299. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 13,13 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2016.

## Perbandingan Belanja Barang

Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 31 DESEMBER 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.829.897.723	2.558.716.070	10,60
Belanja Barang Non Operasional	4.178.686.137	4.496.531.412	(7,07)
Belanja Barang Persediaan	412.073.197	671.085.909	(38,60)
Belanja Jasa	3.005.494.228	2.716.159.564	10,65
Belanja Pemeliharaan	1.935.060.989	2.041.641.819	(5,22)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.228.311.384	6.591.883.698	(35,86)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	109.428.904	142.530.827	(23,22)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>16.698.952.562</b>	<b>19.218.549.299</b>	<b>(13,11)</b>
Pengembalian Belanja	(3.825.000)	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.695.127.562</b>	<b>19.218.549.299</b>	<b>(13,13)</b>

Belanja Modal  
Rp1.609.000.923

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.609.000.923 dan Rp1.211.750.659. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 32,78% dibandingkan periode 31 Desember 2016 disebabkan. Hal ini antara lain disebabkan adanya alokasi pengadaan TV Kantor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peninggian Jalan area Kantor BPHN, Pemasangan CCTV, Meja Rapat, Kursi, Pengembangan website BPHN, Renovasi ruang rapat lantai 2 dan pembuatan jalan khusus disabilitas untuk menunjang kegiatan dan fasilitas kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

### Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 31 DESEMBER 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.276.661	671.767.000	48,90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450.989.971	239.350.000	88,42
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	157.734.291	300.633.659	(47,53)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.609.000.923</b>	<b>1.211.750.659</b>	<b>32,78</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.609.000.923</b>	<b>1.211.750.659</b>	<b>32,78</b>

### ***B.5.1 Belanja Modal Tanah***

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada anggaran ataupun realisasi belanja modal Tanah di Tahun Anggaran 2017.

### ***B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin***

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.000.276.661 dan Rp671.767.000, realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar 48,90 persen.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 31 DESEMBER 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.276.661	671.767.000	48,90
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.000.276.661</b>	<b>671.767.000</b>	<b>48,90</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.000.276.661</b>	<b>671.767.000</b>	<b>48,90</b>

### ***B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan***

Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp450.989.971 dan Rp239.350.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
Periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dan*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 31 DESEMBER 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450.989.971	239.350.000	88,42
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>450.989.971</b>	<b>239.350.000</b>	<b>88,42</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>450.989.971</b>	<b>239.350.000</b>	<b>88,42</b>

#### B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp157.734.291 dan Rp300.633.659.

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan (monografi)	4.864.291	47.858.659	(89,84)
Belanja aplikasi JDHN	34.650.000	19.140.000	81,03
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	118.220.000	233.635.000	-49,40
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>157.734.291</b>	<b>300.633.659</b>	<b>-47,53</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>157.734.291</b>	<b>300.633.659</b>	<b>-47,53</b>

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal

neraca. Rincian as di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 dan 2016*

Keterangan	TH 2017	TH 2016
Bank BNI Cab. Jatinegara Unit BKN (norek 0029334497)	Rp -	Rp -
Uang Tunai	Rp -	Rp -
Uang Muka	Rp -	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

**C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0*

**C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB  
Rp0*

**C.4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp0*

#### **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA  
Rp0*

#### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Lancar  
(Rp0)*

#### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp0) dan (Rp0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar di  
Muka Rp0*

#### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.



Pendapatan yang  
Masih Harus  
Diterima Rp0

### C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan  
Rp165.471.241

### C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp165.471.241 dan Rp173.536.165.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Periode  
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

Jenis	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	107.806.767	115.821.600
Barang untuk Pemeliharaan	2.847.900	3.908.970
Suku Cadang	3.984.300	3.159.000
Bahan Baku	-	4.115.000
Persediaan Lainnya	50.832.274	46.531.595
<b>Jumlah</b>	<b>165.471.241</b>	<b>173.536.165</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR  
Rp0*

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang  
(Rp0)*

### **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah*

### **C.14 Tanah**

*Rp74.534.060.000* Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pembinaan Hukum Nasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp74.534.060.000 dan Rp62.977.940.407. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>62.977.940.407</b>
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	11.556.119.593
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>74.534.060.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah Periode 31 Desember 2017*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	6.691 m2	Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur	74.534.060.000
<b>Jumlah</b>			<b>74.534.060.000</b>

*Peralatan dan  
Mesin*

*Rp17.075.273.919*

**C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp17.075.273.919 dan Rp16.516.817.758. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>16.516.817.758</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.000.276.661
Reklasifikasi Masuk	213.869.052
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke aset Lainnya	6.931.000
Mutasi kurang:	
Penghapusan	-
Reklasifikasi Keluar	(213.869.052)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(448.751.500)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>17.075.273.919</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(12.925.943.268)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>4.149.330.651</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian sebesar Rp1.000.276.661 berupa :

- 1 unit Summersible Pump sebesar Rp190.375.000
  - 1 buah Mesin Ketik Elektronik sebesar Rp1.850.000
  - 1 buah CCTV sebesar Rp93.816.745
  - 2 buah LCD Projector/Infocus sebesar Rp13.990.000
  - 1 buah Alat Perekam Suara sebesar Rp950.000
  - 2 buah Sice sebesar Rp52.800.000
  - 70 buah Meja Rapat sebesar Rp123.730.000
  - 1 buah Kasur/Sprinbed sebesar Rp11.250.000
  - 79 Kursi Fiber Glas/Plastik sebesar Rp123.600.000
  - 1 buah Televisi sebesar Rp7.220.000
  - 1 buah Vertikal Blind sebesar Rp24.527.184
  - 2 buah Alat Komunikasi Telephone Lainnya sebesar Rp17.397.920
  - 1 buah Tabung O2 sebesar Rp1.328.635
  - 1 buah Clinical Thermometer sebesar Rp614.075
  - 1 buah Kursi Dorong sebesar Rp2.791.250
  - 1 buah Bein sebesar Rp671.293
  - 1 buah Alat Kedokteran Lainnya sebesar Rp1.059.559
  - 17 buah PC Unit sebesar Rp170.470.000
  - 7 buah Lap Top sebesar Rp99.012.000
  - 2 buah Note Book sebesar Rp22.400.000
  - 1 buah Scanner sebesar Rp9.600.000
  - 5 buah Printer sebesar Rp17.225.000
  - 2 buah External Hardisk sebesar Rp1.698.000
- b. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp213.869.052 berupa:
- 2 buah Lemari Kayu sebesar Rp9.570.000
  - 5 buah unit Power Supply sebesar Rp90.190.000
  - 1 buah Heater sebesar Rp666.232
  - 1 buah Bracket Standing Peralatan sebesar Rp12.142.560
  - 1 buah Microphone/Wireless MIC sebesar Rp6.589.000
  - 1 buah video Monitor sebesar Rp59.751.660
  - 1 buah Video Test Signal Generator sebesar Rp12.287.000
  - 7 buah Tripod Camera sebesar Rp13.190.600
  - 1 buah Camera Digital sebesar Rp9.482.000

- c. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa 1 buah Penangkal Petir sebesar Rp6.931.000

Mutasi transaksi kurang peralatan dan mesin berupa :

- a. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp213.869.052 berupa:
- 2 buah Lemari Penyimpan sebesar Rp9.570.000
  - 7 buah Tripod Camera sebesar Rp13.190.600
  - 5 buah Stabilizer sebesar Rp90.190.000
  - 1 buah TV Monitor sebesar Rp59.751.660
  - 1 buah Alat Pemanas sebesar Rp666.232
  - 1 buah Movable Dust Colector sebesar Rp12.142.560
  - 1 buah Boster sebesar Rp12.287.000
  - 1 buah portable Wind System sebesar Rp6.589.000
  - 1 buah Kamera Digital sebesar Rp9.482.000
- b. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp448.751.000
- 2 unit Mini Bus sebesar Rp231.615.000
  - 8 unit Sepeda Motor sebesar Rp116.584.000
  - 1 unit Lori Dorong sebesar Rp203.000
  - 1 buah Whiteboard Electronic sebesar Rp2.149.000
  - 12 buah Meja kerja Kayu sebesar Rp6.592.500
  - 25 buah Kursi Besi/Metal sebesar Rp10.908.000
  - 2 buah Sice sebesar Rp2.014.000
  - 27 buah Meja Rapat sebesar Rp4.395.000
  - 10 buah Meja Komputer sebesar Rp1.865.000
  - 2 buah Kursi Fiber Gals/Plastik sebesar Rp2.139.500
  - 7 buah Jam Elektronik sebesar Rp570.000
  - 2 buah AC. Split sebesar Rp12.907.500
  - 1 buah Televisi sebesar Rp6.500.000
  - 6 buah Lambang Garuda Pancasila sebesar Rp625.000
  - 2 buah Gambar Presiden/Wakil Presiden sebesar Rp177.000
  - 2 buah Tiang Bendera sebesar Rp158.000
  - 1 buah Mimbar/Podium sebesar Rp160.000
  - 2 buah Pesawat Telephone sebesar Rp438.000
  - 1 buah Minor Surgical Set sebesar Rp12.000
  - 1 buah Metal Chatheeter sebesar Rp4.000
  - 1 buah Neirbekken Stainless Steel sebesar Rp4.000
  - 1 buah Nasal Speculum Set sebesar Rp8.000

- 1 buah Reflex Hammer sebesar Rp3.000
- 3 buah P.C. Unit sebesar Rp30.580.000
- 2 buah Scanner sebesar Rp18.140.000

*Gedung dan  
Bangunan*

*Rp45.914.571.000*

### C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp45.914.571.000 dan Rp34.609.501.161. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>34.609.501.161</b>
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	450.989.971
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	20.932.528.396
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan Nilai	(10.078.448.528)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>45.914.571.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(10.982.906.353)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>34.931.664.647</b>

Mutasi transaksi penambahan gedung dan bangunan berupa:

- a. Pengembangan nilai aset sebesar Rp450.989.971 berupa:
  - Peninggian Jalan Area Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp272.739.800.
  - Pembuatan Jalan Khusus Disabilitas Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp47.741.870
  - Renovasi Ruang Rapat lantai 2 Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp130.508.301
- b. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset berupa:

- Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp20.850.906.126
- Tugu/Tanda Batas sebesar Rp81.622.270

Mutasi transaksi kurang gedung dan bangunan berupa Koreksi semua hasil penilaian kembali sebesar (Rp10.078.448.528)

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi Rp0*

### C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	-

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp1.487.648.950*

### C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp1.487.648.950 dan Rp1.482.784.659. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>1.482.784.659</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	4.864.291
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	0
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>1.487.648.950</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>1.487.648.950</b>

Mutasi transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya berupa pembelian 41 buah buku perpustakaan sebesar Rp4.864.291. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp14.515.382.081)*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing (Rp14.515.382.081) dan (Rp20.654.921.785). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Pendapatan PNBPNP Rp16.437.996*

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp16.437.996 dan Rp10.960.573. Pendapatan tersebut terdiri dari:



Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Periode 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	74.534.060.000	0	74.534.060.000
1	Peralatan dan Mesin	17.075.273.919	12.923.679.268	4.151.594.651
2	Gedung dan Bangunan	45.914.571.000	1.591.702.813	44.322.868.187
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	1.487.648.950	0	1.487.648.950
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>139.011.553.869</b>	<b>14.515.382.081</b>	<b>124.496.171.788</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak  
Berwujud  
Rp3.352.553.000

### C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp3.352.553.000 dan Rp3.199.683.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>3.199.683.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	34.650.000
Hibah	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	118.220.000
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>3.352.553.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2017	(25.905.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>3.326.648.000</b>

Mutasi transaksi penambahan Aset Tak berwujud berupa:

- Pembelian aplikasi JDIHN sebesar Rp34.650.000
- Pengembangan website BPHN dan aplikasi integrasi sebesar Rp118.220.000

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud periode 31 Desember 2017

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	25.905.000
ATB Lainnya	3.326.648.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.352.553.000</b>

Aset Lain-Lain  
Rp1.528.234.500

### C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp1.528.234.500 dan Rp1.086.414.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>1.086.414.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	448.751.500
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	(6.931.000)
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>1.528.234.500</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(1.086.331.500)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>441.903.000</b>

Mutasi transaksi penambahan Aset Lain-lain berupa :

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa :

- 2 unit Mini Bus sebesar Rp231.615.000
- 8 unit Sepeda Motor sebesar Rp116.584.000
- 1 unit Lori Dorong sebesar Rp203.000
- 1 buah Whiteboard Electronic sebesar Rp2.149.000
- 12 buah Meja Kerja Kayu sebesar Rp6.592.500
- 25 buah Kursi besi/Metal sebesar Rp10.908.000
- 2 buah Sice sebesar Rp2.014.000
- 27 buah Meja Rapat sebesar Rp4.395.000
- 10 buah Meja Komputer Rp1.865.000
- 2 buah Kursi Fiber Glas/Plastik sebesar 2.139.500
- 7 buah jam elektronik sebesar Rp570.000
- 2 buah A.C. Split sebesar Rp12.907.500
- 1 buah Televisi sebesar Rp6.500.000
- 6 buah Lambang Garuda Pancasila sebesar Rp625.000
- 2 buah gambar presiden dan wakil presiden sebesar Rp177.000

- 2 buah Tiang Bendera sebesar Rp158.000
- 1 buah Mimbar/Podium sebesar Rp160.000
- 2 buah pesawat telephone sebesar Rp438.000
- 1 buah Minor surgical sebesar Rp12.000
- 1 buah Metal Chatheeter Rp4.000
- 1 buah Neirbekken Stainless Steel sebesar Rp4.000
- 1 buah Nasal Speculum Set sebesar Rp8.000
- 1 buah Refflex Hammer sebesar Rp3.000
- 3 buah PC. Unit sebesar Rp30.580.000
- 2 buah Scanner sebesar Rp18.140.000

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
(Rp1.553.305.250)*

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing (Rp1.553.305.250) dan (Rp1.112.078.375). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	3.352.553.000	0	3.352.553.000
Software	25.905.000	(25.905.000)	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.378.458.000</b>	<b>(25.905.000)</b>	<b>3.352.553.000</b>
Aset Lain-lain	1.528.234.500	(1.527.400.250)	834.250
<b>Jumlah</b>	<b>4.906.692.500</b>	<b>(1.553.305.250)</b>	<b>3.353.387.250</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari  
KPPN Rp0*

### C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai

uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp117.730.842*

### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp117.730.842 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang pihak ketiga pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa utang daya dan jasa sebesar Rp75.457.842 dan utang uang makan pegawai sebesar Rp42.273.000 Ketiga pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

*Pendapatan Diterima di Muka Rp6.674.667*

### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.674.667 dan Rp16.686.667. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari sewa kantin yang waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Penjelasan</b>
Kantin BPHN	Rp 6.674.667	Sewa kantin 8 bulan kedepan
<b>Total</b>	<b>Rp 6.674.667</b>	

*Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0*

### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada kantor Baan Pembinaan Hukum Nasional.

*Ekuitas Rp127.864.719.770*

### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp127.864.719.770 dan Rp98.262.990.323. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak*

*Periode 31 Desember 2017 dan 2016*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	15.505.363	9.442.499	64,21
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	932.633	1.518.074	(38,56)
<b>Jumlah</b>	<b>16.437.996</b>	<b>10.960.573</b>	49,97

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari dari sewa rumah dinas, sedangkan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah berasal dari paket pekerjaan jasa internet oleh PT. Indonesia Comment Plus dimana terjadi gangguan konektivitas yang menyebabkan jaringan internet mati atau tidak berfungsi.

*Beban Pegawai  
Rp14.712.195.162*

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp14.712.195.162 dan Rp15.747.336.969. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	9.931.969.040	10.673.469.320	-6,95
Beban Pembulatan Gaji PNS	119.033	127.093	-6,34
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	681.363.472	743.384.702	287,45
Beban Tunj Anak PNS	166.712.190	175.858.616	-81,18
Beban Tunj. Struktural PNS	871.140.000	885.740.000	139,66
Beban Tunj. Fungsional PNS	489.875.000	363.485.000	174,08
Beban Tunj. PPh PNS	58.752.247	178.734.928	-88,38
Beban Tunj. Beras PNS	469.209.180	505.708.860	-68,53
Beban Uang Makan PNS	1.478.638.000	1.491.165.000	382,28
Beban Tunjangan Umum PNS	219.920.000	306.595.000	-48,02
Beban Uang Lembur	344.497.000	423.068.450	-97,81
<b>Jumlah</b>	<b>14.712.195.162</b>	<b>15.747.336.969</b>	<b>-6,57</b>

Beban Persediaan  
Rp364.486.669

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp364.486.669 dan Rp520.928.857. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

Periode 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	270.364.042	447.219.330	-39,55
Beban Persediaan Bahan Baku	19.569.800	34.682.527	-43,57
Beban Persediaan Lainnya	74.552.827	39.027.000	91,03
<b>Jumlah</b>	<b>364.486.669</b>	<b>520.928.857</b>	<b>-30,03</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp10.085.710.930

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp10.085.710.930 dan

Rp9.670.806.891. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.534.431.588	2.271.786.840	11,56
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	122.546.135	149.769.230	(18,18)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	172.920.000	137.160.000	26,07
Beban Bahan	3.045.586.137	3.479.081.412	(12,46)
Beban Honor Output Kegiatan	690.975.000	786.390.000	(12,13)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	438.300.000	231.060.000	89,69
Beban Langganan Listrik	1.060.725.905	949.899.887	11,67
Beban Langganan Telepon	76.278.665	102.422.922	(25,53)
Beban Sewa	1.198.247.500	568.936.000	110,61
Beban Jasa Profesi	727.100.000	982.300.000	(25,98)
Beban Jasa Lainnya	18.600.000	12.000.000	55,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.085.710.930</b>	<b>9.670.806.291</b>	<b>4,29</b>

Beban  
Pemeliharaan  
Rp1.993.779.269

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.993.779.269 dan Rp2.091.686.316. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	801.169.286	701.985.483	14,13
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.059.551.703	1.309.732.336	(19,10)
Beban Pemeliharaan Lainnya	48.840.000	0	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	83.832.880	72.208.497	16,10
Beban Persediaan suku Cadang	385.400	7.760.000	(95,03)
<b>Jumlah</b>	<b>1.993.779.269</b>	<b>2.091.686.316</b>	<b>(4,68)</b>

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp4.337.740.288

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.337.740.288 dan Rp6.734.414.525. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.301.188.246	2.692.936.289	-51,68
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	872.900.000	875.850.000	(0,34)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	927.641.885	2.110.641.826	-56,05
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.126.581.253	912.455.583	23,47
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	109.428.904	142.530.827	-23,22
<b>Jumlah</b>	<b>4.337.740.288</b>	<b>6.734.414.525</b>	<b>(35,59)</b>



Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan  
Sosial Rp0

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp4.346.003.128

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.346.003.128 dan Rp3.727.167.481. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Periode 31 Desember 2017 dan 2016*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.850.677.290	1.942.719.403	(4,74)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.494.250.963	1.773.586.082	40,63
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>4.344.928.253</b>	<b>3.716.305.485</b>	<b>16,92</b>
Beban Amortisasi Software	75.625	6.476.250	
Beban Penyusutan aset lain-lain	999.250	4.385.746	(77,22)
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>1.074.875</b>	<b>10.861.996</b>	<b>(90,10)</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>4.346.003.128</b>	<b>3.727.167.481</b>	<b>16,60</b>

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp0)* **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp0) dan (Rp24.769). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Periode 31 Desember 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	-18.577	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	-6.192	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-24.769</b>	<b>(100,00)</b>

**D.11 Kegiatan Non Operasional**

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp120.436.996*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Periode 31 Desember 2017 dan 2016*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtangann BMN Lainnya	77.802.668	44.750.000	73,86
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	39.567.500	32.512.500	21,70
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	50.529.728	39.165.150	29,02
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	47.462.900	2.598.016	1726,89
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>120.436.996</b>	<b>113.829.634</b>	<b>5,80</b>

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa  
Rp0*

#### **D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

### **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp98.262.990.323*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp98.262.990.323 dan Rp98.006.546.766.

*Defisit LO  
(Rp35.703.040.454)*

#### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp35.703.040.454) dan (Rp38.367.526.063). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp0*

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan Rp0*

#### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi  
Aset Tetap  
Rp32.488.647.989

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp32.488.647.989 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset tetap tersebut berupa hasil penilaian tim penertiban aset terhadap nilai Tanah serta Gedung dan Bangunan

Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi  
(Rp34.132.571)

### E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp.34.132.571) dan Rp1.655.869.578. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

per 31 Desember 2017

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai aset Tetap Non Revaluasi	(34.132.571)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
<b>Jumlah</b>	<b>(34.132.571)</b>

Koreksi Lain-Lain  
(Rp0)

### E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp4.378.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

#### Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp32.850.254.483

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp32.850.254.483 dan Rp36.972.478.042. Transaksi

antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	(123.796.164)
Ditagihkan ke Entitas Lain	32.974.050.647
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>32.850.254.483</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar (Rp123.796.164) sedangkan DKEL sebesar Rp32.974.050.647.

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Tidak terdapat transfer masuk /transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

**E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Hibah Langsung dan Pengembalian Pengembalian Hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp127.864.719.7*  
*70*

## **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp127.864.719.770 dan Rp98.262.990.323.

### **A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

#### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Terdapat penurunan Pagu Anggaran dikarenakan adanya Revisi DIPA pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp654.564.000 sesuai dengan Revisi DIPA nomor: SP DIPA-013.10.1.409288/2017 tanggal 15 Februari 2018 atas dasar surat Plt. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.3.KU.01.04-05 tanggal 11 Januari 2018 hal Optimalisasi Sisa Anggaran BPHN TA 2017 untuk dialihkan ke Satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

#### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Terdapat Reklasifikasi Masuk BMN sesuai Berita Acara Reklasifikasi Masuk nomor : PHN.UM.01-01.31 tanggal 26 April 2017 (rincian terlampir)
2. Terdapat Reklasifikasi Keluar sesuai Berita Acara Reklasifikasi Keluar nomor : PHN.UM.01-01.29 tanggal 26 April 2017 (rincian terlampir).
3. Terdapat Reklasifikasi Masuk BMN sesuai Berita Acara Reklasifikasi Masuk nomor : PHN1-PB.04.01-06 tanggal 01 Agustus 2017(rincian terlampir).
4. Terdapat Reklasifikasi Keluar sesuai Berita Acara Reklasifikasi Keluar nomor : PHN.1-PB.04.01-05 tanggal 01 Agustus 2017 (rincian terlampir).

5. Terdapat Koreksi Barang Persediaan sesuai Berita Acara Koreksi Barang Persediaan nomor : PHN1-PB.04.01-04 tanggal 01 Agustus 2017 (rincian terlampir).
6. Terdapat Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan sesuai Berita cara Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan nomor : PHN1.PB.04.01-03 tanggal 01 Agustus 2017 (rincian terlampir).
7. Terdapat Penghentian Penggunaan BMN sesuai Berita Acara Penghentian Penggunaan BMN nomor : PHN1-PB.04.01-02 tanggal 01 Agustus 2017 (rincian terlampir).
8. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN1-38.KU.03.03 Tahun 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-01.KU.03.03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pada tanggal 1 Agustus 2017 terdapat Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang semula dijabat oleh Bapak Danan Purnomo, SH., M.Si menjadi Bapak Audy Murfi MZ, SH., MH.
9. Pada tanggal 31 Desember 2017 masih terdapat utang daya dan jasa bulan Desember 2017, yaitu listrik sebesar Rp71.077.830 dan Telepon sebesar Rp4.380.012 yang telah dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2018 sesuai SP2D nomor 181391303000095, 1813913000093 dan 181391301000164
10. Pada tanggal 31 Desember 2017 masih terdapat utang uang makan pegawai periode 16 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp42.273.000 namun telah dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2018 sesuai SP2D nomor 181391303000109.

11. Terdapat Koreksi Nilai Aset pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional atas adanya Revaluasi Aset Tetap (Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset) berupa Tanah sebesar Rp11.556.119.593 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.932.528.396.
12. Terdapat Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali berupa Gedung dan Bangunan pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp10.078.448.528.
13. Terdapat kegiatan renovasi gedung lantai 1 (satu) dan 4 (empat) Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2017 yang menggunakan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, namun sampai dengan saat pelaporan 31 Desember 2017 BMN yang dimaksud belum diserahkan oleh Sekretariat Jenderal kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.



**Badan Pembinaan Hukum Nasional**  
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,**  
**Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2016	Tahun 2017	Per 31-12-2017	Per 31-12-2017
<b>A</b>	<b>Tanah</b>						
1	Tanah	-	74,534,060	-	-	-	74,534,060
	<b>Jumlah</b>		<b>74,534,060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74,534,060</b>
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Alat Bantu	7	2,105,854,500	686,891,063	245,735,075	932,626,138	1,173,228,362
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	4,617,982,450	4,249,165,685	267,854,873	4,168,821,558	449,160,892
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	0	203,000	-	-	-
4	Alat Bengkel Bermesin	10	3,241,700	750,255	324,170	1,074,425	2,167,275
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	5,506,969	4,405,575	1,101,394	5,506,969	-
6	Alat Ukur	5	4,507,972	2,067,391	901,594	2,968,985	1,538,987
7	Alat Pengolahan	4	0	3,588,750	-	-	-
8	Alat Kantor	5	2,254,357,103	1,613,629,685	220,978,596	1,842,261,281	412,095,822
9	Alat Rumah Tangga	5	3,733,580,500	2,406,310,639	391,267,384	2,826,120,569	907,459,931
10	Alat Studio	5	763,218,368	494,182,603	69,299,666	640,150,209	123,068,159
11	Alat Komunikasi	5	244,452,120	160,753,360	27,062,532	187,377,892	57,074,228
12	Peralatan Pemancar	10	15,923,160	10,028,106	1,592,316	11,620,422	4,302,738
13	Alat Kedokteran	5	288,054,050	259,123,422	8,944,498	268,036,920	20,017,130
14	Unit Alat Laboratorium	8	0	107,523,845	-	-	-
15	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	0	1,882,570	-	-	-
16	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10	2,195,000	1,207,250	219,500	1,426,750	768,250
17	Alat Khusus Kepolisian	4	0	8,296,750	-	-	-
18	Komputer Unit	4	2,381,410,498	1,022,229,123	515,482,750	1,507,131,873	874,278,625
19	Peralatan Komputer	4	654,989,529	446,782,335	99,912,942	528,555,277	126,434,252
	<b>Jumlah</b>		<b>17,075,273,919</b>	<b>11,479,021,407</b>	<b>1,850,677,290</b>	<b>12,923,679,268</b>	<b>4,151,594,651</b>
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	45,736,129,000	9,172,874,762	2,491,383,653	1,589,844,042	44,146,284,958
2	Tugu/Tanda Batas	50	178,442,000	3,025,616	2,867,310	1,858,771	176,583,229
	<b>Jumlah</b>		<b>45,914,571,000</b>	<b>9,175,900,378</b>	<b>2,494,250,963</b>	<b>1,591,702,813</b>	<b>44,322,868,187</b>
<b>F</b>	<b>Aset Tetap Yang Tidak Digunakan</b>						
1	Alat Bantu	7	229,812,000	229,812,000	-	229,812,000	-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	357,594,000	9,395,000	-	357,594,000	-
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	203,000	-	-	203,000	-
4	Alat Kantor	5	5,501,000	10,283,000	-	5,501,000	-
5	Alat Rumah Tangga	5	332,465,500	283,454,000	834,250	331,631,250	834,250
6	Alat Studio	5	825,000	660,000	165,000	825,000	-
7	Alat Komunikasi	5	28,202,000	27,764,000	-	28,202,000	-
8	Alat Kedokteran	5	31,000	-	-	31,000	-
9	Komputer Unit	4	474,731,000	444,151,000	-	474,731,000	-
10	Peralatan Komputer	4	98,870,000	80,730,000	-	98,870,000	-
<b>E</b>	<b>Software</b>						
1	Aset Tak Berwujud	0	25,905,000	25,829,375	75,625	25,905,000	-
	<b>Jumlah</b>		<b>25,905,000</b>	<b>25,829,375</b>	<b>75,625</b>	<b>25,905,000</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>1,528,234,500</b>	<b>1,086,249,000</b>	<b>999,250</b>	<b>1,527,400,250</b>	<b>834,250</b>
	<b>Total</b>		<b>64,618,518,479</b>	<b>21,767,000,160</b>	<b>4,346,003,128</b>	<b>16,068,687,331</b>	<b>48,549,831,148</b>